



Buletin Parlementaria



Misi Khusus Parlemen Antar-Negara Asia untuk Palestina



3 Tiga Ajaran
Bung Karno
untuk
Generasi Muda



5 Guspari Gaus:
Hak Angket untuk
Kecurangan
Pemilu
Tidak Tepat

Nomor 1283/I/III/2024 • Maret 2024



9 772614 339005



Misi Khusus Parlemen Antar-Negara Asia untuk Palestina

Rangkaian kegiatan penyelenggaraan Sidang Pleno Majelis Parlemen Antar-Negara Asia (APA) ke-14 di Baku, Azerbaijan, resmi berakhir pada Jumat lalu (23/2). Pertemuan parlemen-parlemen negara se-Asia ini ditandai dengan dihasilkannya Deklarasi Baku.

Seluruh anggota Parlemen APA telah menyepakati berbagai poin yang tertuang dalam deklarasi itu. Salah satunya, usulan DPR RI, terkait pentingnya peran Komite Palestina untuk dapat mengoptimalkan langkah diplomasi parlemen dalam menghentikan krisis kemanusiaan di Palestina.

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon yang yang mengomandoi usulan

tersebut mengatakan poin tersebut merupakan poin penting untuk menekankan kembali pentingnya isu Palestina, terutama usai dibentuknya Komisi Palestina dalam APA. Fadli Zon sendiri merupakan pimpinan sidang dewan eksekutif APA di Antalya, Turkiye, pada November 2023 lalu, di mana dalam forum tersebut disepakati dibentuknya Komisi Palestina dalam APA.

"Kita mengusulkan terkait dengan Palestina dan usulan dari DPR RI dari BKSAP DPR RI juga tadi sudah diadopsi, disepakati dan bahkan menjadi salah satu poin yang penting, terutama bagaimana menekankan kembali pentingnya isu Palestina ini dengan sudah terbentuknya Komisi Palestina," ujar Fadli kepada **Parlementaria** di Baku, Jumat (23/2).

Selain itu, dalam poin usulan Indonesia juga menginisiasi misi khusus untuk Rafah dalam rangka memonitor situasi kemanusiaan yang terjadi di sana. "Ini adalah bagian dari diplomasi parlemen. Jadi inilah yang kami sampaikan dan diterima dengan baik oleh seluruh peserta dan akan menjadi bagian dari Deklarasi Baku," jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Adapun usulan poin dari Parlemen Indonesia yang diadopsi dalam Deklarasi Baku adalah menekankan pentingnya peran APA membantu penyelesaian krisis di Gaza, Palestina. "Yakni melalui implementasi diplomasi parlemen yang efektif dan melakukan misi khusus ke Rafah untuk mengawasi situasi kemanusiaan di Palestina", tutupnya. — **bia/rdn**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Delegasi Parlemen Indonesia, DPR RI, dalam Agenda Sidang Pleno ke-14 APA di Baku, Azerbaijan, Rabu (23/2/2024).



Tiga Ajaran Bung Karno untuk Generasi Muda



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani.

FOTO: ENO/PDT

Saat meresmikan Taman Pemuda Soekarno di Ngawi, Jawa Timur, pada awal tahun ini, Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan tentang tiga ajaran Bung Karno yang perlu diketahui generasi muda Indonesia. Ajaran pertama adalah Pancasila yang Bung Karno gali dari bumi nusantara dengan intisarinya adalah gotong-royong.

"Generasi muda harus terus kita ingatkan untuk bergotong-royong membangun bangsa dan negara karena generasi muda adalah masa depan Indonesia," kata Puan.

Ajaran berikutnya adalah Trisakti, yaitu berdaulat di bidang politik, berkarya di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Puan menyebut, generasi muda Indonesia perlu tahu dan memahami

ajaran Trisakti Bung Karno agar turut mendasari gerak-gerik pembangunan bangsa dan negara kita.

"(Ajaran) ketiga adalah ajaran agar selalu berpihak kepada wong cilik, *wong cilik, wong cilik*. Bung Karno sejak muda sudah selalu membela kepentingan dan kesejahteraan wong cilik. Ini yang kita harapkan generasi muda Indonesia juga warisi semangatnya," jelas mantan Menko PMK itu.

Puan pun berharap zona-zona lain di kawasan terpadu di Ngawi tersebut dapat segera selesai dibangun. "Tentu saya harap zona-zona lainnya yaitu zona taman kota, zona pendopo, zona perkantoran, dan zona hutan kota juga dapat segera diselesaikan," ucap Mantan Menko PMK ini. **aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH

Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

M. Ibnukhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Agung Hidayat, S.I.P. Ridwan Budiman, S.I.P. Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md,
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.S

ANGGOTA REDAKSI

Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Iwan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbari, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonce Stimpul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afidhillah, Geraldi Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA

Supian, S.E. Larissa Amanda Indianti Siahhaan, S.I.P. Eki Baehaki, S.Sos. M. Rizki Ramadhani, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunanya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chaisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Desain Pemilu Serentak Satu Hari Perlu Dievaluasi

Li ma hari pasca hari pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, pada Senin (19/2/2024), Komisi Pemilihan Umum (KPU RI), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) mengungkapkan bahwa sebanyak 84 anggota Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu 2024 meninggal dunia dan 4.567 sakit.

Atas dasar ini, Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman menilai usulan mendesain ulang sistem pemilu serentak yang melibatkan pemilihan presiden, anggota DPR, anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD, dalam satu hari perlu ditindaklanjuti.

”

SECARA UMUM PEMILU SERENTAK JADI BEBAN KERJA YANG TIDAK PROPORSIONAL, HARUS BEKERJA DI HARI PEMILIHAN DITAMBAH WAKTU PERHITUNGAN SUARA SAMPAI 12 JAM DENGAN CATATAN TANPA JEDA.

“Secara umum pemilu serentak jadi beban kerja yang tidak proporsional, harus bekerja di hari pemilihan ditambah waktu perhitungan suara sampai 12 jam dengan catatan tanpa jeda,” ungkap Aminurokhman, dalam keterangannya yang dikutip **Parlementaria**, di Jakarta, Kamis (22/2).

Politisi Fraksi Partai NasDem itu menjelaskan, sejak awal rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPU, Komisi II sudah mengingatkan soal proses rekrutmen petugas KPPS, mulai dari standarisasi umur hingga kesehatan, agar tidak terulang jatuhnya korban seperti saat Pemilu 2019 silam.

Kendati demikian, pemungutan suara dengan sistem lima surat suara yang harus dijalankan dalam satu hari perlu ditinjau ulang. Hal itu bisa dilakukan dengan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu. “Perlu kita tinjau kembali bukan hanya PKPU (Peraturan KPU), tapi undang-undangnya juga perlu ditinjau ulang secara menyeluruh,” kata dia.

Legislator Dapil Jawa Timur II juga menekankan peninjauan secara menyeluruh sekaligus untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2024. Menurut dia, pesta demokrasi kali ini memiliki persoalan sejak awal proses berjalan hingga pelaksanaan pemungutan suara.

“Kita tekankan bukan hanya pemilu yang jujur dan adil, tapi dari sisi tegaknya demokrasi. Kejanggalan-kejanggalan sejak awal proses pemilu hingga persoalan penggunaan teknologi dari sistem penghitungan juga perlu dievaluasi,” pungkasnya. **we/rdn**



Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman.

FOTO: PDI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Guspardi Gaus: Hak Angket untuk Kecurangan Pemilu Tidak Tepat

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai adanya wacana penggunaan hak angket di DPR untuk merespons dugaan kecurangan dalam Pemilu 2023 adalah sesuatu yang tidak tepat. Ia menilai dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 itu semestinya dibawa ke ranah hukum, bukan ke ranah politik. Ia juga mengatakan bahwa hak angket tersebut memiliki sifat yang politis.

"Kalau ada pelanggaran atau sesuatu yang dirasa tidak sesuai ketentuan terkait pemilu, ada ranah yang diberikan undang-undang kepada siapa pun yang dirugikan, untuk memperkarakan melalui jalur Bawaslu atau Gakkumdu maupun DKPP," kata Guspardi dalam keterangannya yang dikutip *Parlementaria*, di Jakarta, Kamis (22/2).

Legislator PAN itu mengatakan dugaan kecurangan itu bisa dilaporkan ke penyelenggara pemilu, seperti Bawaslu atau Gakkumdu karena merupakan persoalan hukum. Seandainya penyelesaian di Bawaslu dirasa kurang memuaskan, menurutnya undang-undang juga menjamin kontestan untuk memperkarakan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. "Ranahnya di situ. Jadi artinya yang angket ini, kok, ujung-ujug hak angket, ada apa?" tanyanya.

Lebih lanjut, menurutnya, perlu dipahami bahwa DPR itu diisi oleh fraksi dari berbagai partai politik. Sementara itu untuk melakukan hak

”

KALAU ADA PELANGGARAN ATAU SESUATU YANG DIRASA TIDAK SESUAI KETENTUAN TERKAIT PEMILU, ADA RANAH YANG DIBERIKAN UNDANG-UNDANG KEPADA SIAPA PUN YANG DIRUGIKAN, UNTUK MEMPERKARAKAN MELALUI JALUR BAWASLU ATAU GAKKUMDU MAUPUN DKPP.

angket, menurutnya harus didukung oleh lebih 50 persen anggota DPR. "Pertanyaannya bagaimana peta politik yang ada di DPR yang akan mendukung," kata dia.

Selain itu, menurutnya, KPU sebagai penyelenggara belum mengumumkan hasil pemilu secara resmi karena proses rekapitulasi suara masih berlangsung. Sehingga, menurutnya langkah paling tepat untuk merespons dugaan kecurangan itu adalah melaporkannya kepada Bawaslu RI atau ke MK, bukan dibawa ke ranah politis. ➡ [we/rdn](#)

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus.



FOTO: HAN/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya



Dorong Optimalisasi Keselamatan dan Layanan Transportasi oleh PT KAI

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menekankan pentingnya SOP yang komprehensif di PT KAI dan PT Kereta Api Commuter Indonesia, mengingat besarnya jumlah pengguna kereta api yang mencapai 336,47 juta orang hingga November 2023. Hal itu disampaikan Nevi saat mengikuti agenda kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Barat baru-baru ini.

Pada kunjungan kerja Komisi VI DPR RI yang membahas langkah-langkah strategis PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Kereta Api Commuter Indonesia dalam meningkatkan standar operasional prosedur (SOP) untuk keselamatan dan kenyamanan penumpang tersebut, Nevi sempat mengutarakan pandangannya tentang persiapan PT KAI menjelang Idul Fitri dan dukungan pemerintah terhadap BIJB Kertajati, termasuk upaya mengundang UMKM terlibat di lingkungan bandara.

"Peningkatan SOP tidak hanya tentang pencegahan kecelakaan, tapi juga tentang memastikan pengalaman perjalanan yang aman dan nyaman bagi penumpang," ujar Nevi di Jawa Barat, Senin (19/2).

Mengenai Idul Fitri, Nevi sangat berharap PT KAI meningkatkan kualitas layanan dengan terus memberikan yang terbaik pada penumpang. "Kami tidak ingin ada lagi calo tiket atau gangguan kereta. Prioritas kami adalah

menyediakan perjalanan yang aman dan nyaman bagi para pemudik," jelas Politisi Fraksi PKS ini.

Sementara terkait dukungan pemerintah pada BIJB Kertajati ia

”

KAMI TIDAK INGIN ADA LAGI CALO TIKET ATAU GANGGUAN KERETA. PRIORITAS KAMI ADALAH MENYEDIAKAN PERJALANAN YANG AMAN DAN NYAMAN BAGI PARA PEMUDIK.

juga menegaskan, Pemerintah harus berkomitmen penuh dalam mendukung pengembangan infrastruktur dan moda transportasi yang terintegrasi menuju BIJB Kertajati. "Hal ini tentunya akan mendorong lebih banyak penggunaan bandara dan menarik investor," tuturnya.

Menurutnya, manajemen BIJB Kertajati perlu untuk memberikan kemudahan bagi UMKM. "Pelibatan UMKM di lingkungan bandara akan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal dan membantu pertumbuhan ekonomi regional," tutup Nevi. — dep/aha



FOTO: DEP/PDT

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina saat mengikuti agenda kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Barat, Senin (19/2/2024).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Bongkar Dugaan Kartel Penyebab Harga Beras Naik

Harga beras di tanah air terus mengalami kenaikan. Bahkan, kenaikan harga beras ini jauh melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah dan mencetak rekor baru.

Kondisi ini bahkan sampai membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) terjun langsung memeriksa stok beras ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) dan gudang Perum Bulog beberapa waktu lalu. Pasca peninjauan, diketahui bahwa terjadi penumpukan stok beras di kedua lokasi tersebut.

Menanggapi itu, Anggota Komisi VI DPR RI Luluk Nur Hamidah menduga kenaikan harga beras yang tidak terkendali ini merupakan ulah dari permainan pedagang atau kartel. Ia berharap pemerintah mampu membongkar dan menindak hukum para pelaku kartel beras.

"Saya kira hadir lah pemerintah di tengah masyarakat (untuk) melakukan operasi pasar dan kalau memang ditengarai ada kartel beras yang ini udah berpraktek sekian tahun bahkan satu dekade ya dibongkar lah. Kasihan masyarakat umum. Apalagi bagi masyarakat yang kehidupannya baru merayap ya untuk bisa memulai dari pandemi, maka kenaikan harga beras ini udah nggak wajar," ujarnya beberapa waktu lalu kepada *Parlementaria*.

Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional No 7/2023, HET beras berlaku sejak Maret 2023 adalah Rp. 10.900/kg medium, sedangkan beras premium Rp 13.900/kg untuk Zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi. Sementara,

”

SAYA KIRA HADIR LAH PEMERINTAH DI TENGAH MASYARAKAT (UNTUK) MELAKUKAN OPERASI PASAR DAN KALAU MEMANG DITENGARAI ADA KARTEL BERAS YANG INI UDAH BERPRAKTEK SEKIAN TAHUN BAHKAN SATU DEKADE YA DIBONGKAR LAH. KASIHAN MASYARAKAT UMUM. APALAGI BAGI MASYARAKAT YANG KEHIDUPANNYA BARU MERAYAP YA UNTUK BISA MEMULAI DARI PANDEMI, MAKA KENAIKAN HARGA BERAS INI UDAH NGGAK WAJAR,”

Anggota Komisi VI DPR RI Luluk Nur Hamidah.

HET beras di Zona 2 meliputi Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, dan Kalimantan dipatok Rp 11.500/kg medium dan beras premium Rp 14.400/kg. Sementara di zona ke-3 meliputi Maluku dan Papua, HET beras medium sebesar Rp 11.800/kg, dan untuk beras premium sebesar Rp 14.800/kg.

Adapun harga beras medium produksi lokal di PIBC per Rabu (21/2/2024), dipatok di Rp14.000-Rp15.200 per kg. Sementara beras premium di kisaran Rp16.500-Rp17.000 per kg. Artinya, harga beras medium dan premium lokal saat ini sudah jauh melampaui HET.

— hal/rdn



FOTO: DOK/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya



Kejar Target Swasembada Gula di 2028, Pemerintah Harus Perbaiki Tata Kelola Pertanian

Produksi gula nasional terus mengalami defisit. Berdasarkan data Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan, ID Food, produksi gula dalam negeri hanya mampu mencapai 2,4 juta ton. Padahal kebutuhan konsumsi dalam negeri sebesar 7 juta ton.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji akan mendorong pemerintah agar dapat mengembangkan varietas tebu serta meningkatkan produksi gula. Selain itu, Komisi VI juga memperbaiki tata kelola pertanian tebu agar target swasembada gula pada tahun 2028 dapat tercapai.

"Kita dorong supaya ada varietas baru yang bisa ditanam dengan hasil yang lebih baik. Tata kelola pertaniannya juga diperbaiki serta para petani diedukasi bagaimana mengelola lahan dengan baik untuk jangka panjang. Sehingga target swasembada gula pada tahun 2028 dapat tercapai," ungkap Sarmuji kepada **Parlementaria** usai mengikuti pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi IV DPR RI ke Surabaya, Jawa Timur, Senin (19/2).

Lebih lanjut, ia mengatakan saat ini ada beberapa persoalan untuk swasembada gula, baik di sisi off-farm maupun on-farm. Menurutnya, masalah utama di on-farm yaitu kualitas pertanian tebu yang menurun dan bibitnya tidak sebagus dulu lagi. Sedangkan, dari sisi off-farm, Komisi VI meminta harus ada perbaikan fasilitas pabrik gula.

"Kalau enggak dilakukan (perbaikan) dengan mesin yang lama itu pasti (kualitas) rendemen tebu itu pasti akan terpengaruh oleh pabrik yang menggunakan fasilitas lama. Karena itu perlu ada perbaikan-perbaikan guna merealisasikan target yang diinginkan pemerintah," jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Namun, ia menjelaskan kendala lain yang terjadi yaitu tanah yang ada saat ini sebenarnya sudah dieksploitasi semaksimal mungkin dan diberi pupuk berlebihan dengan bermacam-macam varian. Sehingga, perlakuan tersebut dalam jangka panjang mengakibatkan produksi menurun. Oleh karena itu, tegasnya, perlu adanya pembinaan dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN), khususnya pabrik gula bagaimana menanam tebu dengan produksi yang bagus disertai dengan varietas yang baik juga.

"Guna menciptakan swasembada gula, perlu ada lahan terutama pabrik-pabrik gula di mana sebagian besar berada di pulau Jawa, namun sangat disayangkan bila *constrain* (hambatan) lahannya tidak diatasi. Kita mau pacu produksi sebesar apapun tidak mungkin terealisasi. Dengan demikian disarankan bagaimana pihak-pihak yang terkait membuat satu produksi lahan yang besar dengan teknologi yang canggih," jelasnya. — rni/rdn



FOTO: RSB/PDT

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi IV DPR RI ke Surabaya, Jawa Timur, Senin (19/02/2024).



Perlu Perubahan Regulasi Umrah ‘Backpacker’

Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menilai perlu perubahan regulasi untuk mengakomodir adanya kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi yang mengizinkan pelaksanaan umrah mandiri (*backpacker*) dengan menggunakan visa turis. Menurutnya, perubahan regulasi tersebut sejalan dengan semangat DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU).

Adanya pelonggaran kebijakan

tersebut, menurut HNW, masyarakat kini bisa melaksanakan umrah secara lebih mudah tapi juga tetap bertanggungjawab. Di sisi lain, upaya

”

SECARA UMUM, KEBIJAKAN HAJI DAN UMRAH SAUDI SEMAKIN TERBUKA LEBAR UNTUK KEDATANGAN JAMAAH, SEHINGGA PEMERINTAH INDONESIA HARUSNYA ANTISIPATIF DENGAN MENYIAPKAN ATURAN YANG JUGA MEMUDAHKAN JAMAAH.

revisi UU 8/2019 itu sudah dilakukan sejak akhir tahun 2022 ke dalam Prolegnas DPR-RI.

“Secara umum, kebijakan Haji dan Umrah Saudi semakin terbuka lebar untuk kedatangan Jamaah, sehingga Pemerintah Indonesia harusnya antisipatif dengan menyiapkan aturan yang juga memudahkan jamaah. Apalagi Pemerintah bersama DPR juga sedang merancang revisi UU Haji dan Umrah untuk memudahkan fleksibilitas penyelenggaraan Haji, di mana fleksibilitas tersebut bisa turut diberikan pada pelaksanaan Umrah,” disampaikan Hidayat dalam keterangan yang dikutip **Parlementaria** di Jakarta, Rabu (21/2).

Politisi Fraksi PKS ini menjelaskan, dalam UU 8/2019, di Pasal 86 ayat (1) dan (2), penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah dilakukan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), yakni biro Travel yang terdaftar dan berizin di Kementerian Agama. Namun, dengan kebijakan visa turis Saudi, warga yang ingin Umrah kini bisa mengakses langsung dengan cukup memesan tiket pesawat dan mendaftarkan diri di Aplikasi Nusuk yang disediakan dan disosialisasikan oleh pihak Pemerintah Saudi Arabia.

HNW meyakini, jika Umrah mandiri dilegalisasi, tidak terlalu berdampak negatif pada pendaftaran keberangkatan umrah melalui biro Travel. “Pasalnya, masing-masing biro Travel sudah memiliki ceruk jemaahnya sendiri dengan beragam fitur pelayanan. Regulasi baru itu nantinya malah bisa mendorong untuk makin profesionalnya biro travel Umrah, sehingga tidak mengulangi masalah jemaah umrah,” ungkapnya.

tn/rdn



FOTO: RIA/AHA

Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid.

Beras Langka Jelang Ramadhan, Legislator Ingatkan Pemerintah

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani Aher mengatakan langka dan mahal nya beras di pasaran selama beberapa bulan terakhir ini bisa jadi akibat dari kebijakan bansos yang salah penerapan.

tidak urgen sebagaimana zaman Covid-19. Anehnya lagi, bansos jelang pemilu kemarin lebih sering dan lebih banyak ketimbang pada masa pandemi. Pemerintah harus berani mengakui dan mengevaluasi

kebijakan tersebut," tambahnya.

Oleh sebab itu, Netty meminta pemerintah melakukan langkah-langkah penanggulangan dengan aksi nyata daripada sibuk klarifikasi soal bansos dan kelangkaan beras. "Tanggung jawab negara untuk menyediakan bahan pangan murah dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Segera atasi kelangkaan dan kemahalan ini dengan cara-cara efektif, seperti operasi pasar dan kontrol distribusi. Pastikan tidak ada kelompok yang bermain di air keruh, misalnya, adanya penimbunan guna mengeruk keuntungan," tandasnya.

— rmn/aha

”

KONDISI INI MENGKHAWATIRKAN KARENA DAPAT MENURUNKAN DAYA BELI MASYARAKAT TERHADAP BAHAN POKOK. PADAHAL SEBENTAR LAGI KITA MEMASUKI BULAN SUCI RAMADHAN DAN IDUL FITRI DI MANA KEBUTUHAN AKAN BAHAN POKOK MENINGKAT.

"Kondisi ini mengkhawatirkan karena dapat menurunkan daya beli masyarakat terhadap bahan pokok. Padahal sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri di mana kebutuhan akan bahan pokok meningkat," kata Netty dalam keterangan tertulis yang diterima **Parlementaria** di Jakarta, Jumat (23/2).

Netty tidak sependapat dengan pemerintah yang menyebut langka dan mahal nya beras di pasaran karena perubahan cuaca yang membuat hasil panen turun.

"Alasan adanya El Nino dan gagal panen bukanlah faktor tunggal yang membuat beras menjadi langka dan mahal. Kebijakan bansos yang ugul-ugalan tanpa memikirkan ketersediaan pasokan juga menjadi faktor penyebab beras langka. Bansos jor-joran ini



FOTO: DOK/PBT

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani Aher.



Bawa ke Ranah Hukum, Bubarkan Geng Pelaku Perundungan di Sekolah

Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan agar kasus perundungan (*bullying*) yang terjadi segera ditindaklanjuti ke ranah hukum. Isu ini memperoleh sorotan tajam darinya lantaran peristiwa perundungan antar siswa di lingkungan sekolah kembali terjadi.

Berdasarkan laporan yang ia terima, seorang siswa SMA internasional di Serpong, Tangerang Selatan, diketahui kini dirawat di rumah sakit usai akibat dirundung oleh seniornya, yang merupakan geng sekolah bernama 'Geng Tai'. Perundungan tersebut terjadi di sebuah warung yang berlokasi di depan sekolah.

"Sekolah harus tegas, bubarkan geng itu. Kalau perlu dibawa ke ranah hukum," tanggap Dede dalam keterangan tertulis yang dikutip oleh **Parlementaria**, di Jakarta, Selasa (20/2).

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu juga mengingatkan agar pihak sekolah turut proaktif membubarkan geng tersebut sekaligus melakukan mitigasi. Baginya, tidak boleh ada toleransi terhadap kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah.

Sebab itu, Dede meminta pihak sekolah untuk menerapkan penuh Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbud Ristek PPKSP). Regulasi ini menjadi payung

”

SEKOLAH HARUS TEGAS, BUBARKAN GENG ITU. KALAU PERLU DIBAWA KE RANAH HUKUM. DI SEKOLAH TIDAK DIPERBOLEHKAN KEKERASAN ATAU BULLYING SESUAI PERMENDIKBUD YANG SUDAH ADA. JANGAN SAMPAI KEKERASAN BERKEDOK INISIASI MASUK GENG JADI PEMBENARAN.

hukum guna mencegah terjadinya kekerasan seksual, perundungan, serta diskriminasi dan intoleransi.

Tidak hanya mencegah saja, Permendikbud Ristek PPKSP ini turut membantu satuan pendidikan menangani kasus-kasus kekerasan yang terjadi mencakup kekerasan dalam bentuk daring, psikis, dan lainnya dengan berperspektif pada korban. "Di sekolah tidak diperbolehkan kekerasan atau bullying sesuai Permendikbud yang sudah ada. Jangan sampai kekerasan berkedok inisiasi masuk geng jadi pembenaran," tegasnya.

ts/rdn



FOTO: DPR/PDT

Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi.

Scan QR untuk berita selengkapnya



Jor-Joran Bansos Diduga Penyebab Beras Langka dan Mahal

Anggota Komisi XI DPR RI Hidayatullah menilai kebijakan pemerintah yang melakukan jor-joran bansos beras diduga menjadi salah satu penyebab harga beras mahal dan stok langka di pasaran. Menurutnya, berdasarkan data BPS, faktor inflasi komoditas makanan adalah penyumbang inflasi terbesar.

"Peranan komoditas makanan mencapai 74,21%, sementara non makanan hanya sebesar 25,75% (Maret 2023), pemerintah harus segera mengatasi, apalagi disinyalir jor-joran bansos beras juga merupakan penyebab beras langka," katanya sebagaimana dikutip Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (17/2)

"Rakyat mengeluh harga makanan terus melonjak naik, masalah ini terkait tata kelola yang masih semrawut kemudian data pangan yang tidak akurat hingga insentif bagi petani berkurang, terbukti beras produksi Indonesia menjadi yang termahal di antara negara produsen beras," papar Politisi Fraksi PKS ini.

Hidayatullah menyebut berdasarkan data BPS beberapa komoditas yang perlu diwaspadai kenaikan harganya adalah cabai merah, beras, dan daging ayam ras. "Karena kenaikan harga harga tersebut akan berpotensi menjadi penyumbang inflasi Februari 2024, tentu pemerintah tidak boleh tinggal diam karena yang terdampak adalah rakyat," katanya.

la juga mengungkap faktor

harga beras yang tinggi saat ini disebabkan dominasi pasar beras di dalam negeri dikuasai oleh sekelompok konglomerat, yang semestinya dikuasai oleh negara lewat Perum Bulog. "Selain karena

”

RAKYAT MENGELUH HARGA MAKANAN TERUS MELONJAK NAIK, MASALAH INI TERKAIT TATA KELOLA YANG MASIH SEMRAWUT...

masalah keterbatasan pasokan, juga tata kelola beras selama ini masih amburadul," ujarnya.

Harga beras kembali melonjak pada, Jumat (16/2/2024). Bahkan, cetak rekor baru lagi, baik untuk jenis premium maupun medium. Harga beras premium naik Rp 40 ke Rp15.940 per kg. Sepekan lalu, 9 Februari 2024, harganya masih di Rp15.530 per kg.

Harga beras medium naik Rp20 ke Rp13.970 per kg. Sepekan lalu, harganya masih di Rp13.600 per kg. Harga tersebut adalah rata-rata harian nasional di tingkat pedagang eceran, mengutip Panel Harga Badan Pangan, pukul 14.25 WIB.

— rdn



FOTO: QQ/AHA

Anggota Komisi XI DPR RI Hidayatullah.



Delegasi DPR RI Suarakan Pentingnya Reformasi WTO

Delegasi DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menekankan pentingnya agenda reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Terutama yang menyangkut pengaktifan kembali mekanisme penyelesaian sengketa di WTO (*Appellate Body*) yang telah lama stagnan akibat adanya intervensi Amerika Serikat beberapa waktu lalu.

Pernyataan tersebut diungkapkan pada kesempatan Konferensi Parlemen di WTO (PC WTO) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Minggu (25/2). Pada pertemuan tersebut Ketua BKSAP yang juga sebagai Co-Chair yang turut memimpin jalannya

sidang, berpendapat pengaktifan kembali mekanisme penyelesaian sengketa harus disertai dengan

**”
TERUTAMA YANG
MENYANGKUT
PENGAKTIFAN
KEMBALI MEKANISME
PENYELESAIAN
SENGKETA DI WTO
(APPELLATE BODY) YANG
TELAH LAMA STAGNAN
AKIBAT ADANYA
INTERVENSI AMERIKA
SERIKAT BEBERAPA
WAKTU LALU.**

peningkatan independensi dan transparansi WTO, agar bebas dari aksi unilateral dari negara manapun.

Sementara itu di kesempatan yang sama Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana (F-Partai Demokrat) dan Sukamta (F-PKS) juga berkesempatan menjadi penanggung aktif pada sesi diskusi terkait Perdagangan Multilateral Inklusif dan Teknologi Digital. Putu Supadma menyampaikan kepentingan nasional Indonesia terkait hilirisasi yang tengah menjadi sorotan di WTO, sedangkan Sukamta menyatakan pentingnya pengakhiran segera moratorium pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik.

Pada pertemuan yang dilaksanakan menjelang Konferensi Tingkat Menteri ke-13 WTO tersebut, Delegasi Indonesia menyuarakan kepentingan nasional Indonesia terkait isu-isu perdagangan di WTO, antara lain isu *Fisheries Subsidies*, *Public Stockholding*, serta perlunya pengakhiran moratorium pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik.

Dialog yang cukup aktif antara kelompok negara-negara berkembang dengan negara maju mewarnai jalannya diskusi. Terutama dengan adanya perbedaan pendapat antara keduanya, terhadap isu-isu strategis di WTO.

Di sela-sela pertemuan Delegasi DPR RI juga berkesempatan untuk berbincang dengan Delegasi dari Korea Selatan dan Parlemen Eropa terkait isu-isu yang didiskusikan. Turut hadir dalam pertemuan Wakil Anggota BKSAP Irine Yusiana Roba Putri (F-PDIP), Andi Ahmad Dara (F-PG) dan Himmatul Aliyah (F-Partai Gerindra). **ssb/aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon dalam foto bersama di sela-sela Konferensi Parlemen di WTO (PC WTO) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Minggu (25/2/2024).

FOTO: IST/PDT

Parlemen Se-Asia Dorong Keadilan bagi Rakyat Palestina

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menyerukan parlemen se-Asia untuk mendorong keadilan bagi rakyat Palestina. Hal ini ia sampaikan dalam pidato saat menghadiri Sidang Pleno ke-14 *Asian Parliamentary Assembly* (APA) di Baku, Azerbaijan dengan tema membina kerja sama regional untuk pembangunan berkelanjutan di Asia.

Fadli Zon yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Sidang Pleno tersebut menyampaikan pernyataan di sesi 'General Debate' dengan mengutuk keras segala praktik Israel yang telah melanggar hak asasi manusia rakyat Palestina di Gaza dan masih berlanjut sampai saat ini.

Ia menyatakan bahwa meskipun Mahkamah Internasional (ICJ) telah memerintahkan Israel untuk mencegah segala aksi genosida, korban jiwa di Gaza tetap bertambah. Bahkan wilayah Rafah yang merupakan wilayah yang paling padat penduduknya di dunia juga dibombardir oleh Israel.

"Ini adalah abad ke-21 yang serba modern dan menghadirkan banyak peluang, namun pelanggaran hak asasi manusia di Gaza masih terjadi di depan mata dengan brutal. Apalagi 70 persen dari 29 ribu korban jiwa adalah perempuan dan anak-anak tak berdosa. Situasi di Rafah pun sangat memprihatinkan. Sekitar 1,5 juta orang di sana tak lagi memiliki tempat yang aman untuk mengungsi. Praktik genosida ini harus dihentikan. Perintah dari Mahkamah Internasional kepada Israel harus diimplementasikan secara nyata," ujar Fadli di Baku, Azerbaijan, Kamis (22/2).

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut menyampaikan

bahwa praktik Israel tak sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, yang merupakan tema

”

INI ADALAH ABAD KE-21 YANG SERBA MODERN DAN MENGHADIRKAN BANYAK PELUANG, NAMUN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI GAZA MASIH TERJADI DI DEPAN MATA DENGAN BRUTAL.

utama pertemuan Parlemen se-Asia di Azerbaijan ini.

Fadli mempunyai pandangan bahwa parlemen, termasuk parlemen anggota APA mempunyai peran besar dalam isu kemanusiaan di Gaza dengan secara efektif menggunakan fungsi diplomasi parlemen dan bekerja sama mendukung upaya menghentikan kekejaman Israel.

Terkait hal tersebut, Fadli menyerukan empat hal penting yang harus diangkat saat berdialog, yaitu mendukung adanya gencatan senjata di Gaza, memastikan akses bantuan kemanusiaan secara penuh, diperluas dan tanpa hambatan bagi warga

Palestina, memastikan bahwa perintah Mahkamah Internasional terhadap Israel dilaksanakan secara efektif, dan menyerukan kepada negara-negara terkait untuk segera lanjutkan bantuan dana mereka ke UNRWA.

Selain itu, ia juga menyerukan Komite APA untuk Palestina untuk dioperasionalkan secara efektif. Dalam hal ini, Fadli berpandangan bahwa Komite APA terkait Palestina tak boleh melakukan 'business-as-usual'. Mereka harus menetapkan dan mencapai tujuan yang jelas, memberikan solusi strategis, dan melakukan misi khusus untuk melihat secara langsung keadaan di Palestina. **bia/aha**



Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon saat menghadiri Sidang Pleno ke-14 Asian Parliamentary Assembly (APA) di Baku, Azerbaijan, Kamis (22/2/2024).



BKSAP Dorong Komitmen Parlemen Antar-Negara Asia dalam Pembangunan Berkelanjutan

Sidang Pleno Asian Parliamentary Assembly (APA) atau Sidang Parlemen Antar-Negara Asia kembali digelar di Baku, Azerbaijan, pada 21-24 Februari 2024. Delegasi Parlemen Indonesia yang diwakili oleh jajaran pimpinan dan anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI turut hadir dalam agenda tersebut.

Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana mengatakan delegasi Indonesia turut aktif dalam pembahasan berbagai hal menyangkut pembangunan berkelanjutan di Asia. Seperti dalam sesi *Standing Committee on Economic and Sustainable Development*, parlemen antarnegara Asia ingin hadir lebih konkret dalam mendorong isu-isu yang menyangkut permasalahan lingkungan dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

"Karena memang kita ketahui banyak terjadi permasalahan kendala tentang lingkungan dan juga dampak climate change terhadap kondisi global yang memang sudah nyata terjadi. Memang dalam forum-forum internasional baik IPU atau forum lainnya, isu ini menjadi isu-isu yang sangat penting, juga dalam *high level political forum* untuk akselerasi tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs juga terus dikomitmenkan agar agenda 2030

segera dapat terimplementasi," ujar Putu kepada Parlemenaria, di Baku, Azerbaijan, Kamis (22/2).

Putu menambahkan, kawasan Asia yang merupakan wilayah dengan penduduk terbesar, yakni lebih dari 50 persen penduduk dunia, diharapkan aktif dan berkomitmen untuk terus mengawal pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. "Yang kedua, bagaimana lingkungan juga terjaga dan bagaimana pertumbuhan itu juga eksklusif diterima dampaknya secara ekonomi oleh masyarakat di kawasan Asia," jelasnya.

Ke depan, ia berharap komitmen Parlemen antarnegara Asia terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan sumbangsih yang signifikan dalam upaya mencapai SDGs. "Kita berharap ke depan kita mampu memberikan sumbangsih

yang signifikan dalam pengawalan khususnya dalam bidang sustainable growth atau pun dalam pencapaian SDGs dalam menangkal climate change dan dalam isu-isu yang berhubungan dengan ketahanan energi maupun ketahanan air," harap Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Diketahui, pada hari kedua penyelenggaraan Sidang Umum ke-14 APA, Putu Supadma didampingi Anggota BKSAP Puteri Anetta Komarudin dan Jazuli Juwaini menghadiri *Standing Committee on Economic and Sustainable Development*. Sementara itu, Anggota BKSAP Puteri Anetta Komarudin dan Vanda Sarundajang juga menghadiri *Standing Committee on Budget and Planning*.

— **bia/rdn**



FOTO: BIA/PDT

Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana saat Sidang Pleno Asian Parliamentary Assembly (APA) atau Sidang Parlemen Antar-Negara Asia di Baku, Azerbaijan, Kamis (22/2/2024).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Program Kerja dan Rencana Strategis APA Disepakati pada Pertemuan Selanjutnya di Qatar 2024

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Vanda Sarundajang bersama Puteri Anetta Komarudin mengikuti sesi Komite Tetap untuk Penganggaran dan Perencanaan (Standing Committee on Budget and Planning) yang merupakan salah satu agenda dalam penyelenggaraan Sidang Pleno ke-14 Asian Parliamentary Assembly (APA) di Baku, Azerbaijan, 21-24 Februari 2024. Dalam sesi tersebut, Vanda menyebut bahwa Program Kerja dan Rencana Strategis Forum APA akan disepakati pada pertemuan selanjutnya pada pertengahan tahun 2024 di Qatar mendatang.

Sebab, dalam pertemuan APA kali ini di Baku, Azerbaijan, belum ada kesepakatan terkait berapa nominal yang disepakati parlemen negara anggota APA sebagai kontribusi terhadap APA. Untuk itu, ia berharap dalam forum selanjutnya agar dapat disepakati berapa anggaran yang dibutuhkan dengan rencana strategis dan program yang jelas.

"Dalam pertemuan tadi belum tercapai kesepakatan antara negara-negara anggota APA berkenaan dengan berapa kemudian anggaran yang kita sepakati bersama untuk bagian dari kontribusi negara-negara anggota APA terhadap Sekretariat APA. Kami mendorong untuk membuat *strategic plan* dalam setahun agar programnya jelas, anggaran yg dibutuhkan berapa, sehingga menghasilkan *outcome*

yang baik bagi negara-negara anggota APA," jelas Vanda kepada Parlementaria, di Baku, Azerbaijan, Kamis (22/2).

Diketahui selama ini APA belum menyepakati berapa kontribusi resmi parlemen anggota APA. Sehingga masih akan terus dibahas hingga menemukan kesepakatan. Parlemen Indonesia menilai kontribusi anggota APA penting agar organisasi ini dapat berjalan lebih baik.

Adapun tema dalam

penyelenggaraan Sidang Pleno ke-14 APA di Baku, Azerbaijan ini adalah *Fostering Regional Cooperation for Sustainable Development in Asia*.

Delegasi Parlemen Indonesia yang hadir adalah agenda Sidang Pleno APA ke-14 kali ini adalah Ketua BKSAP Fadli Zon, Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma, Anggota BKSAP Puteri Anetta Komarudin, Jazuli Juwaini, Agustina Wilujeng Pramestuti, Vanda Sarundajang, Kamrussamad.

— **bia/rdn**



FOTO: BIA/PDT

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Vanda Sarundajang bersama Puteri Anetta Komarudin mengikuti sesi Komite Tetap untuk Penganggaran dan Perencanaan (Standing Committee on Budget and Planning) yang merupakan salah satu agenda dalam penyelenggaraan Sidang Pleno ke-14 Asian Parliamentary Assembly (APA) di Baku, Azerbaijan, 21-24 Februari 2024.

Scan QR untuk berita selengkapnya



Komisi Palestina APA Didorong Lebih Aktif Suarakan Kemerdekaan Palestina

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Jazuli Juwaini berharap agar Komisi Palestina (Committee on Palestine) yang menjadi salah satu komisi di forum Asian Parliamentary Assembly (APA) dapat lebih aktif menyuarakan Kemerdekaan Palestina. Diketahui, Komisi Palestina merupakan komisi yang baru terbentuk pada sidang Dewan Eksekutif APA, di Antalya, Turkiye, November 2023 lalu.

Komisi khusus terkait Palestina ini berfokus untuk melakukan upaya diplomasi parlemen untuk mendorong perdamaian, menghentikan perang, sekaligus investigasi atas tindakan kejahatan perang Israel, serta mendorong kemerdekaan Palestina.

"Kami berpandangan bahwa Komisi Palestina harus menjadi komisi terkuat di lembaga (APA) ini, dalam situasi seperti ini dan pernyataannya harus didengarkan dan lebih aktif dibandingkan komite lainnya dalam situasi seperti ini," ujar Jazuli Juwaini, dalam *Standing Committee on Political Affairs* di Sidang Pleno APA ke-14 di Baku, Azerbaijan, Jumat (24/2).

Hal ini, lanjut Jazuli, melihat bagaimana pembunuhan dan penghancuran terhadap Palestina terjadi setiap hari. Sehingga, setidaknya Komisi Palestina APA dapat mendahulukan kepentingan Palestina dibanding kepentingan lainnya.

"Karena pembunuhan terjadi

”

KAMI BERPANDANGAN BAHWA KOMISI PALESTINA HARUS MENJADI KOMISI TERKUAT DI LEMBAGA (APA) INI, DALAM SITUASI SEPERTI INI DAN PERNYATAANNYA HARUS DIDENGARKAN DAN LEBIH AKTIF DIBANDINGKAN KOMITE LAINNYA DALAM SITUASI SEPERTI INI.

setiap hari dan penghancuran terjadi setiap hari. Memang benar persoalan ekonomi, persoalan budaya, dan persoalan lainnya itu penting, namun dalam keadaan seperti ini persoalan Palestina harus kita dahulukan," tekan Politisi Fraksi PKS ini.

Untuk itu, Anggota Komisi I DPR RI ini pun berharap Komisi Palestina dapat lebih aktif lagi bekerja secara konkret untuk mendorong segera kemerdekaan Palestina. "Komite Palestina bukan sekadar komite yang dibentuk tetapi harus menjadi komite yang lebih aktif dibandingkan komite lainnya. Kami mengusulkan agar Komite Palestina bertahan sampai Palestina merdeka dari Israel," harapkan. — **bia/rdn**



FOTO: BIA/PDI

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Jazuli Juwaini dalam *Standing Committee on Political Affairs* di Sidang Pleno APA ke-14 di Baku, Azerbaijan, Jumat (24/2/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Setjen DPR Raih KPPN Award, Legislator Apresiasi Kerja Sekjen DPR dan Jajarannya

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Agung Budi Santoso, mengapresiasi kinerja Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, beserta jajarannya, sehingga mampu meraih dua penghargaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Award 2023 dari Direktorat Jenderal Pembendaharaan (DJP) Kementerian Keuangan.

"Saya mengapresiasi Sekjen DPR dan tentu beserta jajarannya atas kinerjanya selama ini. Sehingga mampu meraih penghargaan dari KPPN Award 2023 ini. Tentu prestasi ini bukan hal yang mudah, mengingat selain DPR RI banyak kementerian dan lembaga lain yang juga berusaha untuk melaksanakan penggunaan anggaran dengan baik. Namun pada akhirnya DPR dinilai menjadi salah satu yang terbaik dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan Negara," ujar Agung melalui pesan singkatnya kepada Parlementaria, Senin (26/2).

Meski demikian, Legislator Fraksi Partai Demokrat ini menambahkan, dengan penghargaan tersebut bukan berarti Setjen DPR bisa lebih santai ke depannya. Namun lebih dari itu, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI harus lebih memberikan yang terbaik lagi dalam hal pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparansi dan bertanggung jawab.

Sebagaimana diketahui beberapa hari lalu, Setjen DPR berhasil meraih dua penghargaan dalam KPPN Award 2023, yakni peringkat III dalam kategori nilai Indikator

”

TENTU PRESTASI INI BUKAN HAL YANG MUDAH, MENINGGAT SELAIN DPR RI BANYAK KEMENTERIAN DAN LEMBAGA LAIN YANG JUGA BERUSAHA UNTUK MELAKSANAKAN PENGGUNAAN ANGGARAN DENGAN BAIK. NAMUN PADA AKHIRNYA DPR DINILAI MENJADI SALAH SATU YANG TERBAIK DALAM PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA.

Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan Pagu Besar di atas Rp750 Miliar. Ditambah peringkat III untuk kategori Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

KPPN Awards merupakan penghargaan yang diberikan kepada satuan-satuan kerja mitra KPPN yang dinilai telah menjalankan pengelolaan keuangan Negara yang baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta ketepatan waktu dalam mencapai target dan realisasi kegiatan. — ayu/aha



FOTO: DOK/PIBT

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Agung Budi Santoso.

Scan QR untuk berita selengkapnya



Suprihartini: Kerja Sama DPR RI dan Media Berperan Penting dalam Pengembangan KEK Batam

Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Suprihartini menilai kerja sama yang erat antara DPR RI dan media punya peran penting dalam membangun pemahaman publik tentang pentingnya Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Hal tersebut Suprihartini sampaikan dalam Kegiatan Forum

Komunikasi dan Sosialisasi dengan tema 'Sinergi DPR RI dan Wartawan Parlemen dalam Mendukung Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus' di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (23/2).

"DPR RI sendiri memiliki peran kunci dalam pembentukan

”

...TETAPI JUGA SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGENALKAN SECARA LANGSUNG POTENSI DAN PERKEMBANGAN TERKINI DI KEK BATAM KEPADA WARTAWAN PARLEMEN.

undang-undang dan kebijakan yang mendukung pengembangan KEK.

Melalui legislasi yang tepat, DPR RI dapat menciptakan lingkungan hukum yang kondusif untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi di Batam,"

katanya.

Berbagai hal positif yang diharapkan tersebut, menurutnya, dapat lebih diinformasikan ke khalayak dalam rangka sosialisasi

kinerja kedewanan. Serta dalam forum inilah, yang dinilai Suprihartini tepat untuk memulai hal tersebut.

"Setelah acara ini berlangsung, kami berharap teman-teman dari KWP (Koordinatoriat Wartawan Parlemen) sekalian dapat menyebarkannya lewat pemberitaan di media masing-masing. Sebarkanlah informasi soal Batam ini dan bagaimana peran legislasi dan pengawasan dari parlemen terhadap penguatan area ini sebagai blok ekonomi khusus," pintanya.

Lebih lanjut, Suprihartini menjelaskan pemilihan Kota Batam sebagai lokasi penyelenggaraan forum diskusi juga bukan tanpa alasan, melainkan salah satu bentuk kepedulian DPR terhadap pembangunan di Batam

"Tidak hanya sebagai simbol kepedulian DPR RI terhadap pengembangan Batam, tetapi juga sebagai upaya untuk mengenalkan secara langsung potensi dan perkembangan terkini di KEK Batam kepada wartawan parlemen," pungkasnya.

Turut hadir dalam acara, Anggota Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan; Plh Inspektur Utama M. Djazuli; Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi; Kepala Pusat Pengembangan KPBPB dan KEK Batam, Irfan Syakir Widyasa; Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait; Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial Setjen DPR RI M. Ibnurkhalid dan Ketua KWP, Ariawan. [we/rdn](#)



FOTO: MR/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya



Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Suprihartini dalam Kegiatan Forum Komunikasi dan Sosialisasi dengan tema 'Sinergi DPR RI dan Wartawan Parlemen dalam Mendukung Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus' di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (23/2/2024).

Sekjen DPR: Berikan Kompetensi Terbaik bagi Organisasi

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menegaskan konsep Parlemen Modern menuntut seluruh pihak di Setjen DPR untuk memberikan kompetensi terbaik bagi organisasi, dalam hal ini lembaga DPR RI.

Hal itu ia ingatkan kepada seluruh pejabat, baik struktural maupun fungsional, bahwa tantangan setiap waktu berbeda, termasuk membangun Parlemen Modern saat ini. Karena itu, Setjen DPR RI harus terus mempersiapkan diri dan memberikan kompetensi yang terbaik bagi organisasi, yakni organisasi yang bisa merespons segala hal-hal baru yang dibutuhkan oleh *stakeholder*, dalam hal ini *stakeholder* utamanya lembaga DPR, walaupun ada publik

"Namun kita harus bisa merespons dinamika yang ada di DPR. Pejabat fungsi dan struktural harus bisa mengantisipasi itu," ujar Indra usai melantik sepuluh pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/2).

Tak berlebihan, menurutnya, Tim Kinerja DPR akan terus mengevaluasi dan merotasi setiap lini yang ada. Rotasi tersebut bisa dilakukan per tahun, enam bulan, atau tiga bulan sekali. Rotasi tersebut dilakukan untuk memperbaiki hal-hal yang dinilai masih lemah dan menggantinya dengan yang lebih kuat.

"Terlebih lagi, tahun ini merupakan tahun terakhir DPR RI periode 2019 – 2024. Sehingga Setjen DPR RI sebagai supporting system akan

terus membantu menuntaskan agenda yang sudah dijalankan oleh dewan. Dengan demikian, di penghujung masa baktinya, anggota dewan periode ini terlihat semakin membaik," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, selain terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi DPR RI Periode 2019-2024 ini, Indra juga berpesan agar ada persiapan dalam menyambut dinamika yang kemungkinan akan terjadi dalam pergantian keanggotaan DPR RI Periode 2024-2029, yang akan berlangsung pada Oktober mendatang.

"Selaku organisasi pendukung, Setjen DPR sudah mempersiapkan dan mengantisipasi keanggotaan baru di bulan oktober mendatang. Seperti perubahan jumlah fraksi, dan anggota. Serta bagaimana untuk penetapan AKD-nya," tambahnya.

Adapun pejabat struktural yang dilantik adalah Jaka Adiwiguna dengan jabatan barunya sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Kerja Sama Organisasi Internasional; Miranti Widiani sebagai Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Kerja Sama Organisasi Internasional; dan Haryanti sebagai Kepala Subbagian Fasilitas Kegiatan Luar Negeri. Sementara pejabat dan fungsional yang dilantik kali ini adalah Yudarana Sukarno Putra sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya; Anna Jeanne Harianja sebagai dokter gigi ahli Madya; Baginda Edy Mulyanta Surbakti, Pusparini Wulandari, Wahyuniarti sebagai Perawat Penyelia, sedangkan Yati Mulyawati sebagai Terapis Gigi dan Mulut Penyelia. [ayu/rdn](https://www.ayu/rdn)



FOTO: HANI/PDT

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar melantik sepuluh pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/2/2024).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Yankes DPR Edukasi Pegawai Terkait Deteksi Dini Kanker Serviks dan Payudara

Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Rudi Rochmansyah menegaskan Bagian Pelayanan Kesehatan (Yankes) DPR RI akan selalu memberikan edukasi dalam bidang kesehatan. Diantaranya lewat seminar dan sosialisasi-sosialisasi terkait berbagai tindakan preventif, dan penanganan beberapa penyakit yang ada.

"Yankes DPR RI sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Biro Umum, akan terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang paripurna secara promotif, preventif, dan rehabilitatif. Salah satunya lewat edukasi berupa talkshow atau seminar-seminar kesehatan yang rencananya akan digelar minimal empat kali dalam satu tahun," ujar Rudi usai membuka Seminar dengan tema Warnai Mentari (Wanita Cerdas Indonesia Mengenal dan memahami

Kanker Serviks dan Payudara) di ruang Abdul Muis, Senayan, Jakarta, Selasa (21/2).

Terkait pemilihan tema seminar kali ini, Rudi menambahkan hal tersebut diantaranya bertepatan dengan hari Kanker Sedunia yang jatuh setiap tanggal 4 februari. Selain itu, kanker juga menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia dan dunia selama ini. Dengan adanya seminar kesehatan tentang Kanker ini diharapkan akan bertambah kesadaran masyarakat terhadap penyakit ini. Sehingga dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap penyakit ini.

Sementara itu, salah satu narasumber yang ikut memberikan materi dalam dr Boy Abidin, SpOG, Subsp (K) FER dari RS. Mitra Keluarga mengungkapkan apresiasinya untuk Setjen DPR RI, khususnya Unit Kerja Yankes yang telah menggelar seminar atau talkshow tentang

Kanker Serviks dan Payudara ini. Pasalnya, dari hasil penelitian terlihat di Indonesia, setiap jam ada satu wanita yang meninggal akibat Kanker ini. Dari kasus meninggal tersebut kebanyakan dikarenakan terlambat deteksi dini yang akhirnya juga terlambat dalam melakukan pengobatan.

"Saya melihat antusiasme dari para peserta, ditambah dukungan dari Biro Umum dari DPR ini, Yankes, ini sangat luar biasa. Para pegawai, karyawan beserta keluarga di lingkungan DPR/MPR ini juga perlu disadari atau diingatkan kembali mengenai deteksi dini atau screening untuk kanker serviks dan kanker payudara. Jadi ini menarik sekali," ungkap Boy.

Bentuk screening, lanjut Boy, tidak hanya untuk mengetahui gejala kanker serviks dan payudara saja, melainkan juga untuk mendeteksi dini adanya Human Papillomavirus (HPV) yang notabene merupakan penyebab penyakit menular seksual (PMS) dan juga kanker serviks.

Oleh karena itu pihaknya menyarankan agar seminar atau talkshow sejenis terus dilakukan secara berkala, dengan tujuan untuk selalu mengingatkan deteksi dini kanker, serta berbagai penyakit lainnya. Selain Boy, hadir dalam kesempatan itu memberikan ilmu dan pengetahuan terkait pencegahan dan deteksi dini Kanker Payudara, Dr Wimpie Florentinus Panggarbesi, SpB,K-Onk, dan Cici Puspita Sari, Amd.Keb sebagai penyuluh kanker payudara.

ayu/aha



FOTO: JKA/PDI

Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Rudi Rochmansyah saat membuka Seminar tersebut di ruang Abdul Muis, Senayan, Jakarta, Selasa (21/2/2024).

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



BK Ajak Perguruan Tinggi Kolaborasi Guna Cerdaskan Bangsa & Negara

Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Inosentius Samsul membuka Seminar Nasional dan Rapat Koordinasi dengan para mitra MoU BK dengan tajuk 'Sinergitas Antara Badan Keahlian Dan Perguruan Tinggi Dalam Menunjang Evidence Based Policy Making'. Samsul mengungkapkannya, mengungkapkannya dengan adanya seminar nasional yang diselenggarakan bisa membukakan akses yang lebih mudah bagi perguruan tinggi untuk berkolaborasi dalam perumusan kebijakan DPR RI sebagai langkah mencerdaskan bangsa dan negara.

"Sebenarnya ketika Badan Keahlian DPR RI berkolaborasi dengan perguruan tinggi merupakan sesuatu yang biasa kami lakukan. Tinggal kita membuka ruang atau pintu bagi mereka, agar bisa ikut mencerdaskan bangsa dan negara ini melalui keterlibatan perumusan

kebijakan yang ada di DPR RI," kata Samsul dalam wawancara kepada Parlementaria di Jakarta Pusat, DKI Jakarta, hari Jumat (23/2).

Samsul menambahkan bahwa BK DPR RI juga sedang mengembangkan sistem integrasi data yang akan memudahkan proses pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence based policy making) di DPR RI. Sistem ini akan menghubungkan berbagai sumber data yang relevan, baik dari internal maupun eksternal DPR RI, sehingga dapat diakses dengan cepat dan mudah oleh para pengguna.

"Rencana untuk integrasi dan penerapan integrasi data memiliki tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas dukungan kita kepada AKD (Alat Kelengkapan Dewan)," papar Samsul.

Samsul juga mengungkapkan bahwa BK DPR RI akan menerapkan sistem delivery digital yang akan mempermudah komunikasi dan koordinasi antara BK DPR RI

dan AKD DPR RI. Sistem ini akan memanfaatkan platform aplikasi SIMFONI yang sudah ada di DPR RI, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyampaian hasil kajian dan analisis.

"Kalau sudah modelnya seperti ini (integrasi data) *delivery*-nya menjadi digital. Jadi artinya, AKD melalui Kabagset (Kepala Bagian Sekretariat) nanti tinggal ketik saja ke portalnya BK kemudian masalah apa yang mau diminta atau disampaikan kepada BK DPR RI juga akan tersimpan secara otomatis. Jadi kita basisnya digital dengan menggunakan platform melalui aplikasi SIMFONI yang ada di DPR RI saat ini," tutur Samsul.

Teddy Prasetyawan, salah satu narasumber dari Seminar Nasional memberikan komentar positif tentang kerjasama antara BK dan perguruan tinggi. Ia menilai dengan menggunakan teknologi informasi, kolaborasi tersebut dapat dilakukan dengan lebih sering dan efektif.

mun/aha



FOTO: MUN/PDT

Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Inosentius Samsul foto bersama usai membuka Seminar Nasional dan Rapat Koordinasi dengan para mitra MoU BK dengan tajuk 'Sinergitas Antara Badan Keahlian Dan Perguruan Tinggi Dalam Menunjang Evidence Based Policy Making' di Jakarta Pusat, DKI Jakarta, hari Jumat (23/2/2024).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Sekretariat Komisi di DPR Ujung Tombak Integrasi Data 'Simfoni'

Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Inosentius Samsul menyebut bahwa Sekretariat Komisi merupakan salah satu dari ujung tombak integrasi data Badan Keahlian. Posalnya, Sekretariat Komisi mempunyai sumber data yang berkaitan dengan kegiatan di komisi maupun sumber data dari para mitranya, yaitu kementerian dan lembaga.

Maka dari itu, BK DPR RI menyelenggarakan Rapat Koordinasi bersama Alat Kelengkapan Dewan dengan tema 'Penguatan Sinergi dalam Pembangunan Integrasi Data Badan Keahlian DPR RI dan Alat Kelengkapan DPR RI'.

"Sehingga kami menganggap penting Kabag Set (Kepala Bagian Setkom) ini memahami dan terlibat secara aktif dalam membesarkan ataupun membangun sistem ini,"

ujar Sensi, sapaannya, kepada Parleментарia usai rapat koordinasi di Jakarta, Kamis (15/2).

”

JADI DIHARAPKAN DENGAN SISTEM INI, MAKA DATA RESOURCES KITA LEBIH BANYAK. TENTUNYA KETIKA DATA ITU BANYAK, MAKA BAHAN UNTUK DIANALISIS YANG KEMUDIAN DIBERIKAN KEPADA ANGGOTA PUN AKAN LEBIH LEBIH LEBIH BERMUTU, YA, KARENA DIDUKUNG DENGAN SUMBER DATA YANG BANYAK.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Simfoni yang merupakan field project integrasi data Badan Keahlian DPR dibentuk dalam rangka untuk menunjang kerja yang lebih efisien, lebih efektif dan lebih cerdas. Adapun saat ini, Simfoni sedang dalam tahap uji site.

"Jadi diharapkan dengan sistem ini, maka data *resources* kita lebih banyak. Tentunya ketika data itu banyak, maka bahan untuk dianalisis yang kemudian diberikan kepada anggota pun akan lebih lebih bermutu, ya, karena didukung dengan sumber data yang banyak," jelasnya.

Maka dari itu, dirinya berharap rapat antara Badan Keahlian dengan AKD tersebut mampu memunculkan kesadaran bersama tentang pentingnya integrasi data. "Dan yang kedua juga kita juga semakin mendapat dukungan ya agar proses ini bisa dipercepat dan nanti hasilnya bisa lebih cepat juga dimanfaatkan oleh anggota dewan," terang Sensi, sapaan akrabnya.

Diketahui, rapat Koordinasi ini merupakan serangkaian acara yang melibatkan mitra Badan Keahlian, seperti akademisi maupun AKD dalam DPR RI. Adapun site Simfoni yang mengusung konsep integrasi data tersebut direncanakan akan diluncurkan pada tanggal 22 Februari mendatang dan respons dari para perguruan tinggi yang telah bekerja sama dengan Badan Keahlian.

"Harapan kami pada saat itu juga mereka bisa memberikan lagi tambahan pemikiran untuk memperbaiki atau memperkuat konsep ini," tutupnya. hal/rdn



Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Inosentius Samsul.

Scan QR untuk berita selengkapnya



FOTO: HAL/PDI



**Kegiatan Forum Komunikasi
dan Sosialisasi dengan
tema 'Sinergi DPR RI dan
Wartawan Parlemen dalam
Mendukung Batam sebagai
Kawasan Ekonomi Khusus'
di Batam (23/2/2024).**

FOTO: MRI/PDT

